

## MODEL SOSIALISASI BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL II MEDAN DALAM MELAKUKAN NEGOSIASI PEMBEBASAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN UNDERPASS

**Wahyu Ziaulhaq**

Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang  
wahyuziaulhaq@gmail.com

e-ISSN: 2985-7996

**Article History:**

Received: 01-01-2023

Accepted: 16-01-2023

**Abstrak** : Penelitian ini berupaya mendeskripsikan model sosialisasi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II dalam melakukan negosiasi lahan untuk pembangunan Underpass di Jalan Brigjen Katamso Medan. Tujuan penelitian ini sebagai edukasi kepada pembaca. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara. Hasil penelitian ini dilihat dari sisi internal dan eksternal yaitu sebagai berikut: Pertama, komunikasi pemetaan luas lahan dan ganti rugi oleh tim negosiator di lapangan agar dapat mengetahui lahan-lahan masyarakat yang akan dibebaskan. Kedua, sosialisasi terkait pembelian lahan dan ganti rugi bangunan masyarakat, ketiga melakukan sosialisasi dengan-cara yang persuasif dan humanis.

**Kata Kunci** : Model Komunikasi, Negosiasi, Underpass



## PENDAHULUAN

Komunikasi memiliki perbedaan-perbedaan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, disebabkan oleh kekhasan dalam tujuan negara, sistem pemerintahan, latar belakang kebudayaan, pandangan hidup bangsa, dan nilai-nilai yang melekat pada rakyat, yakni rakyat Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika itu. Ditinjau dari ilmu komunikasi yang juga mempelajari dan meneliti proses, yakni proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk mengubah sikap, pendapat dan perilakunya, maka pembangunan melibatkan dua komponen yang kedua-duanya merupakan manusia yang pertama adalah komunikator pembangunan yang harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menyebarkan pesan kemudian yang kedua adalah komunikan pembangunan, baik penduduk kota maupun penduduk desa, yang harus diubah sikap, pendapat, dan perilakunya. Suatu bangsa yang hendak mengintensifkan usaha untuk pembangunan harus berupaya agar banyak dari warganya lebih menilai tinggi orientasi ke masa depan, dan dengan demikian bersifat hemat untuk bisa lebih teliti memperhitungkan hidupnya dimasa depan, lebih menilai tinggi hasrat eksplorasi untuk mempertinggi kapasitas berinovasi, lebih menilai tinggi orientasi ke arah achievement karya, dan akhirnya menilai tinggi mentalitas berusaha atas kemampuan sendiri, percaya kepada diri sendiri, berdisiplin murni, dan berani bertanggung jawab sendiri. Dengan demikian, pembangunan nasional yang digalakkan di Indonesia ini, yakni dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, harus bersifat paradigmatik, yakni merupakan pola yang membangkitkan inovasi bagi masa yang dijalani dan dihadapi sebagaimana ditegaskan dalam GBHN. (Sholeh, 2018)

Bukannya bersifat dilematik dan problematik, terutama dalam pelaksanaannya, disebabkan oleh kurang pahaman akan mentalitas bangsa sendiri. Keberhasilan komunikasi pembangunan tidak lepas dari adanya komunikasi pembangunan. Permasalahan paling dominan pada pengembangan komunikasi jalan di Kota Medan khususnya Underpass di Jalan Brigjen Katamsi Medan adalah permasalahan pelepasan lahan. Permasalahan pelepasan lahan yang dilakukan dengan pembebasan lahan tersebut pada gilirannya secara signifikan berdampak pada pembiayaan pembangunan jalan, jadwal pekerjaan dan disain fisik jalan. Dalam kasus ini pembebasan lahan dilakukan dengan pendekatan humanis, tidak menggunakan kekerasan namun tentu ada saja pro dan kontra yang terjadi di masyarakat muslim, kontra tersebut terjadi karena masyarakat muslim enggan untuk melepaskan lahan mereka kepada pemerintah padahal sesungguhnya dengan mereka melepaskan lahan mereka sangat membantu pemerintah pusat dalam rangka mempercepat pembangunan nasional demi kepentingan publik. Pelaksanaan komunikasi pembebasan lahan yang dilakukan oleh pihak balai berjalan alot sehingga pembebasan lahan terhambat. Masalah yang muncul sehingga sosialisasi dan komunikasi negosiasi pembebasan lahan berjalan alot penyebabnya adalah sebagai berikut *Pertama*. Kurangnya dukungan pemerintah dalam mensosialisasikan proyek/investasi di daerahnya. Hal ini dirasakan karena persepsi yang bertolak belakang antara pemilik lahan dengan pemerintah. *Kedua*. Persepsi yang tinggi dari masyarakat dan khususnya pemilik tanah terhadap harga tanah yang akan dibeli oleh lembaga negara dinilai masyarakat begitu murah sehingga masyarakat enggan untuk melepaskan lahannya. *Ketiga*. Adanya kekhawatiran yang besar oleh sebagian besar pemilik lahan bahwa proses pembebasan lahan yang ditawarkan instansi tidak transparan, tidak langsung (tanpa perantara), intimidatif. Lebih lanjut kekhawatiran itu semakin besar. *Keempat*. Adanya kekhawatiran pemilik lahan/masyarakat terhadap dampak lingkungan terhadap suatu proyek dan lebih lanjut kekhawatiran tersebut dipengaruhi oleh pihak ketiga yang memprovokasi. Kepentingan/kecemburuan pribadi atau kelompok-

kelompok tertentu. *Kelima*. Faktor perbedaan gaya bahasa menjadi salah satu tantangan dalam proses pembebasan lahan khususnya pada tahap negosiasi antara pemilik lahan dengan pemerintah. *Keenam*. Lahan tersebut merupakan lokasi masyarakat untuk mencari pendapatan kehidupan masyarakat untuk menafkahkan keluarga mereka sebab lahan tersebut merupakan lahan masyarakat untuk berdagang. (Suharyadi et al., 2015)

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu sebuah penelitian sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut yang berusaha untuk mengungkapkan fakta-fakta /fenomena-fenomena sebenarnya yang terjadi di lapangan. Dikatakan demikian karena jenis penelitian ini mempunyai ciri-ciri antara lain *setting* yang aktual, peneliti adalah instrumen kunci, data bersifat deskriptif, menekankan kepada proses, analisis datanya bersifat induktif, dan *meaning* (pemaknaan) tiap peristiwa adalah merupakan perhatian yang esensial dalam penelitian kualitatif. Dikatakan fakta-fakta karena sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan peristiwa sosial, dengan cara mengungkapkan peristiwa-peristiwa faktual di lapangan dan mengungkapkan nilai-nilai yang tersembunyi (*hidden value*), lebih peka terhadap informasi-informasi yang bersifat deskriptif dan berusaha mempertahankan keutuhan obyek yang diteliti. Pendekatan. Berdasarkan hal di atas pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitis. pendekatan deskriptif analitis bertujuan untuk melukiskan, memaparkan, menjabarkan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Pendekatan ini juga bertujuan untuk mendapatkan uraian mendalam tentang ucapan, tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu atau kelompok masyarakat maupun organisasi dalam setting tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang komprehensif.

Untuk memberikan bobot yang lebih tinggi pada metode ini, maka data atau fakta yang ditemukan dianalisa dan disajikan secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Di samping pendekatan yang digunakan yakni deskriptif analitis, seluruh rangkaian cara kerja atau proses penelitian kualitatif ini berlangsung secara simultan (serempak), dilakukan dalam bentuk pengumpulan, pengolahan dan menginterpretasikan sejumlah data dan fakta yang ada dan selanjutnya disimpulkan (Gusti, n.d.)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pemetaan Wilayah

Pemetaan luas wilayah merupakan suatu proses pencatatan, perhitungan, dan publikasi data demografis yang dilakukan terhadap semua penduduk yang tinggal menetap di suatu wilayah atau negara tertentu secara bersamaan. Pendataan luas wilayah untuk dibebaskan lahannya dilaksanakan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan secara bertahap. Pendataan luas lahan untuk dibebaskan lahannya juga dapat diartikan sebagai proses keseluruhan dari mulai pengumpulan, pengolahan, penilaian, penganalisisan, dan penyajian data serta data kependudukan yang menyangkut ciri-ciri demografi, jenis tanah, bangunan dan lingkungan hidup dari penduduk. Menurut Kepala Komunikasi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan menyampaikan kepada peneliti bahwa. Pendataan luas lahan yang akan dibebaskan. Pendataan Lahan memiliki beberapa tujuan untuk menyediakan sebuah data dasar, luas, lebar dan kontur lahan dan perubahan iklim di lokasi tersebut sampai dengan wilayah administrasi yang terkecil (desa/kelurahan). Tujuan kedua adalah untuk menyediakan sebuah data kepemilikan lahan yang lebih rinci dan mendalam

untuk perkiraan parameter kependudukan melalui survai kependudukan. Tujuan ketiga adalah untuk menyediakan data potensi desa diseluruh jalan Brigjen Katamso Medan. Tujuan keempat adalah untuk menyusun kerangka induk yang akan digunakan sebagai acuan dasar pada tahapan eksekusi lahan dan realisasi pembangunan Underpass. Pada penetapan lokasi ini melibatkan tim yang berasal dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan dan instansi terkait. (Santika W.M. Mengi, 2021)

Pengadaan ini dilakukan bersama-sama sesuai kebutuhan lahan dari wilayah yang akan dibebaskan. Ketua pelaksana pengadaan tanah dipercayakan kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan, lokasi yang sudah diterima dan ditetapkan maka hasilnya diumumkan kepada masyarakat melalui media cetak maupun media elektronik tentang rencana pembangunan dilokasi tertentu. Pengumuman dilakukan setelah keberatan-keberatan dari masyarakat sudah tidak ada lagi. Namun pada prinsipnya bahwa pelepasan lahan untuk kepentingan umum ini didasarkan pada pemberian ganti rugi yang layak bagi para pemegang hak, benar-benar digunakan untuk kepentingan umum, tidak ada alternatif lokasi lain, dan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ganti kerugian adalah penggantian atas nilai tanah berikut bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan sebagai akibat penyerahan atau pelepasan hak atas tanah dalam bentuk uang, yang telah disepakati oleh pihak-pihak lain yang bersangkutan terhadap tanah pribadi milik masyarakat atau tanah peribadatan milik bersama. Ganti kerugian dapat dilakukan dalam bentuk uang, tanah pengganti, pemukiman kembali yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan berdasarkan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam keputusan panitia pelepasan tanah. Apabila tidak terjadi atau tidak tercapainya kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian maka panitia dapat menentukan bentuk dan besarnya ganti kerugian didasarkan kepada kemampuan anggaran dasar dalam membiayai ganti rugi tersebut. Pada persoalan saat ini ganti rugi lahan dan bangunan yang diberikan oleh pihak kami sebagai penyelenggara pembangunan Underpass di Jalan Brigjen Katamso Medan kepada masyarakat muslim, ganti rugi tersebut dilakukan melalui pemabayaran uang tunai yang diserahkan kepada pemilik lahan dan bangunan mereka. Komunikasi peningkatan keamanan masyarakat pada pra dan pasca pembebasan lahan. Pembinaan keamanan yang dilakukan oleh aparat Polsek Kecamatan Medan Maimun dan Koramil Kecamatan Medan Maimun didukung oleh unsur keamanan kecamatan setempat adalah suatu upaya aparat dalam mengakomodir peran masyarakat guna secara aktif berpartisipasi dalam menjaga keamanan di lingkungan masing-masing. Mengingat keamanan merupakan kebutuhan pokok setiap individu oleh karena itu tugas dan tanggung jawab dalam menciptakan keamanan menjadi tugas seluruh lapisan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) bukanlah sesuatu yang baru dalam system keamanan nasional, tetapi sudah menjadi nilai-nilai dan tradisi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Bahkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 prinsip-prinsip keamanan ketertiban masyarakat ini secara eksplisit ikut dirumuskan. (Rachmawati, n.d.)

Hal ini mengingat keamanan dan ketertiban masyarakat sesuatu yang fundamental Peningkatan keamanan masyarakat harus intens dilakukan pagi, siang malam, sebab operasi pembebasan lahan untuk pembangunan Underpass di Jalan Brigjen Katamso Medan rawan ditunggangi oleh tokoh-tokoh yang kontra terhadap pembebasan lahan, maka sebagai antisipasi pencegahan terjadinya kericuhan, keonaran, konflik vertikal dan huru-hara maka kita membutuhkan aparat berwenang yang dalam hal ini kita butuhkan POLRI, TNI dan unsur penduduk keamanan kecamatan setempat, sehingga para petugas kita di lapangan kita yang bekerja tidak

mengalami gangguan dan hambatan yang dapat memperlambat proses pembebasan lahan dan pembangunan jalan Underpass.

## **B. Model Komunikasi Kepada Masyarakat Terkait Pentingnya Pembangunan Nasional**

Pembangunan menjadi salah satu poin penting dalam suatu daerah, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Apalagi, suatu daerah memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pembangunan yang memadai, dapat menarik investor untuk berinvestasi. Pemerintah pusat diminta untuk memberikan perhatian pada daerah yang membutuhkan dukungan infrastruktur. Masih banyak masyarakat yang menilai jika pembangunan infrastruktur hanya menguntungkan beberapa orang saja. Sedangkan bagi masyarakat bawah, pembangunan infrastruktur dinilai tidak terlalu bermanfaat. Adapun yang menjadi perhatian pemerintah disamping membangun pendidikan guna menciptakan sumber daya manusia berkualitas, yaitu dengan membangun infrastruktur. Indonesia mendukung pembangunan Underpass di Jalan Brigjen Katamso Medan. Bahkan pada tahun 2016 sendiri pemerintah melakukan kebijakan dengan mengalihkan subsidi energi untuk belanja (pembiayaan) yang lebih produktif yaitu infrastruktur. Mengapa pemerintah lebih mementingkan pembangunan. Hal ini dikarenakan dengan adanya pembangunan infrastruktur di suatu daerah maka akan membuat industri di daerah tersebut tumbuh dan berkembang karena industri tumbuh dan berkembang otomatis akan menyerap sumber daya manusia di Indonesia khususnya di Kota Medan. Perbaikan dan pengembangan infrastruktur akan menyebabkan munculnya industri yang nantinya akan menyerap sumber daya manusia yang dimiliki oleh Indonesia. Hal ini menyebabkan pengangguran yang tadinya banyak menjadi berkurang diserap oleh industri. Di Indonesia sudah terbukti ketika pemerintah memperbaiki pembangunan infrastrukturnya, pengangguran menjadi berkurang serta berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa jumlah pengangguran turun sebanyak 430 ribu orang dan jumlah penduduk yang bekerja mengalami peningkatan di sektor perdagangan/ sektor industri. Maka dari pada itu infrastruktur merupakan salah satu ujung tombak dari keberhasilan penyelenggaraan negara di Negara yang kita cintai ini. Untuk mempekokoh pengetahuan masyarakat terkait pentingnya pembangunan infrastruktur maka dibutuhkan penyuluhan pembangunan sehingga masyarakat Brigjen Katamso Medan sadar akan pentingnya pembangunan di era modernisasi saat sekarang ini. (Yuliana, 2017)

Penyuluhan pembangunan infrastruktur kita berikan kepada masyarakat Brigjen Katamso Medan guna memperkokoh keilmuan masyarakat, penyuluhan ini dilakukan atas dasar masih rendahnya antusiasme masyarakat untuk rela melepaskan lahan dan bangunannya untuk dibangun fasilitas infrastruktur publik seperti pembangunan jalan Underpass, infrastruktur merupakan program utama pemerintahan dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan merata sehingga masyarakat merasakan hadirnya negara ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang di implementasikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur publik tersebut, infrastruktur Underpass di Jalan Brigjen Katamso Medan tidak hanya mempermudah mobilisasi masyarakat dari satu lokasi ke lokasi lainnya namun juga sebagai penunjang peningkatan ekonomi masyarakat sehingga distribusi barang dan jasa yang bernilai ekonomis tinggi menjadi lancar dan ekonomi masyarakat tetap stabil, melalui Penyuluhan ini dilakukan agar tercapainya cita-cita bangsa Indonesia adil makmur dan sejahtera. Forum Kemitraan pembangunan Jalan Nasional dan Masyarakat (FKPJNM) suatu organisasi komunikasi antara para tokoh pembangunan nasional dan masyarakat. Latar belakang terbentuknya wadah ini berangkat dari suatu pemahaman bahwa untuk memelihara

stabilitas hubungan erat, menjaga dan mendorong terciptanya kondisi yang kondusif pada saat pra dan pasca pembangunan. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan tidak bisa bekerja sendiri tetapi mau tidak mau mesti melibatkan peran serta masyarakat. Apalagi dalam era teknologi dewasa ini infrastruktur bangunan menjadi prioritas di pemerintahan pusat Republik Indonesia. Pembangunan merupakan wujud representatif sebagai negara yang maju, maka untuk itu pembangunan menjadi unsur utama pada era pemerintahan 2019 ini.

Balai Besar pelaksanaan Jalan Nasional II Medan sebagai alat negara untuk mewujudkan pembangunan yang merata, memberikan kepuasan kepada masyarakat pada bidang infrastruktur jalan dan memberikan pelayanan masyarakat perlu membangun sinergisitas dengan berbagai elemen masyarakat. Aksi nyata yang telah kita lakukan selanjutnya dalam memperkokoh komunikasi dengan masyarakat melalui Program Forum Kemitraan Pembangunan Jalan Nasional dan Masyarakat yang sudah kita bina, forum ini sebagai fasilitator dalam menghubungkan kita kepada masyarakat, forum ini dari masa ke masa selalu kita tingkatkan guna memperkuat sinergisitas yang optimal, hasil dari forum ini luar biasa, salah satunya adalah tim negosiator Balai Besar pelaksanaan Jalan Nasional II Medan yang bertugas dilapangan dapat diterima oleh masyarakat setempat sehingga petugas kita dilapangan tidak mendapatkan ancaman dari masyarakat setempat, melalui forum ini para negosiator dapat bebas menyampaikan pesan –pesan sosialisasi pembebasan lahan, maka dari pada itu Forum Kemitraan Pembangunan Jalan Nasional dan Masyarakat merupakan salah satu media yang tepat agar terwujudnya pembangunan Undepass di Jalan Brigjen Katamso Medan.(Hassan, 2018)

## KESIMPULAN DAN SARAN

Proses pembebasan lahan dengan tujuan untuk dibangunnya fasilitas umum yaitu jalan underpass merupakan tantangan yang berat sebab tidak semua masyarakat merelakan lahannya di ganti rugi untuk pembangunan jalan oeh karena itu butuh kerja keras oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan untuk melakukan negosiasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan komunikasi yang persuasif dan humanis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Gusti, R. R. (n.d.). *Strategi Public Relations Dalam Kegiatan Pembebasan Lahan Batu Dan Pasir Oleh PT . Calvary Abadi Pembebasan Lahan.*
- Hassan, H. (2018). Manajemen Konflik dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Batang – Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(1), 1–20.
- Rachmawati, I. D. (n.d.). *Konflik Sosial Warga Pereng Akibat Pembebasan Lahan Tol Sumo Di Sidoarjo.*
- Santika W.M. Mengi. (2021). Problematika Pembebasan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Manado - Bitung. *Jurnal Politico*, 10(3), 1–12.
- Sholeh, M. N. (2018). Manajemen Risiko Pelabuhan Rakyat Guna Mendukung Rantai Pasok Nasional. *Jurnal Rekayasa Sipil (JRS-Unand)*, 14(2), 73. <https://doi.org/10.25077/jrs.14.2.73-80.2018>
- Suharyadi, E., Cangara, H., Salle, A., Hasanuddin, U., Hukum, I., Hukum, F., & Hasanuddin, U. (2015). *Dalam Proses Ganti Kerugian Tanah Pelebaran Jalan Trans Sulawesi Poros Makassar-Parepare Di Kabupaten Pangkep.* 4(2), 161–171.
- Yuliana, T. (2017). Konflik Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan Alternatif. *Universitas Negeri Semarang*, 1–153.